

Advokasi Women in Tourism Indonesia sebagai Implementasi Sustainable Development Goals Nomor 5

Maria Agatha Renaningtyas¹, A.A Bagus Surya Widya Nugraha²

Universitas Udayana

renaningtyas.2212521037@student.unud.ac.id¹, aabasuwinu@unud.ac.id²

Abstract

This research discusses advocacy efforts by Women in Tourism Indonesia (WTID) as an implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) number 5, namely gender equality. As an organization that focuses on tourism and gender equality, WTID advocates in related fields to realize its goal of creating gender-inclusive tourism. This research explains the form of advocacy carried out by WTID to realise gender-equitable sustainable development. This research uses descriptive qualitative methods by collecting primary and secondary data. Primary data is in the form of interviews with WTID resource persons and secondary data is in the form of literature related to the topic discussed. Based on the data that has been obtained, it can be concluded that the advocacy programme by WTID is in line with the principles and indicators of SDGs number 5, namely gender equality. The implementation of advocacy carried out by WTID is in the form of research on sexual violence in the tourism industry, inclusive tourism webinars involving tourism actors and disability groups, and hearings related to gender issues in tourism with the government as a policy maker.

Keywords : Sustainable Development Goals, Gender Equality, Tourism, Gender Inclusive

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu bidang prioritas penggerak ekonomi nasional Indonesia. Indonesia menuangkan komitmennya di bidang pariwisata pada dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020–2024. Pada dokumen tersebut, pariwisata ditetapkan sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan nasional (JDIH BPK, 2020). Pemerintah Indonesia berupaya untuk memperkuat sektor pariwisata melalui pengembangan destinasi pariwisata. Pengembangan destinasi wisata ini dilakukan dengan langkah konkret seperti peningkatan investasi pariwisata, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata, dan pembangunan destinasi prioritas. Industri pariwisata secara signifikan menyumbang USD16,7 miliar bagi devisa negara dan memberikan 25 juta lapangan pekerjaan (Siaran Pers, 2025). Namun, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa pariwisata sebagai industri andalan pendukung pembangunan nasional masih memiliki persoalan yang perlu dituntaskan. Salah satu persoalan yang perlu dituntaskan adalah isu ketimpangan gender pada industri pariwisata yang menyebabkan perempuan mendapatkan upah 14,7 persen lebih kecil daripada laki-laki di sektor ini (Gandhawangi, 2020).

Kekerasan terhadap pekerja perempuan di sektor pariwisata masih menjadi isu yang sangat mendesak dan krusial untuk segera diselesaikan. Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender (KPBG) rentan terjadi terutama pada pekerja perempuan di sektor pariwisata. Pekerja perempuan, mulai dari staf hotel, pemandu wisata, hingga pelayan restoran, seringkali berada dalam posisi rentan. Lingkungan kerja yang dinamis dan interaksi yang intens dengan berbagai pihak, baik kolega maupun wisatawan, membuka celah bagi terjadinya berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan verbal, fisik, hingga seksual. Menurut survey dari International Labour Organization (ILO), sebanyak 22,8% atau setara dengan 743 juta pekerja di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Kekerasan ini mencakup berbagai bentuk, baik fisik, psikologis, maupun seksual (Komnas Perempuan, 2022). Kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja tidak dapat dilepaskan dengan budaya patriarki yang mengakar (Oktaviani et al., 2025).

Budaya tersebut didukung oleh adanya relasi kuasa di tempat kerja. Dalam banyak kasus, pekerja perempuan memiliki posisi yang lebih rendah secara hierarki dibandingkan atasan atau bahkan tamu, membuat mereka enggan untuk melaporkan insiden kekerasan karena takut kehilangan pekerjaan atau menghadapi konsekuensi negatif lainnya. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak pekerja perempuan dan mekanisme pelaporan yang jelas juga berkontribusi pada minimnya kasus yang terungkap. Melalui CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan kekerasan terhadap pekerja perempuan terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak adil, masalah terkait kompensasi PHK, serta ketidakadilan dalam struktur dan skala upah serta promosi jabatan. Buruh perempuan juga menghadapi hambatan signifikan terkait kebebasan berserikat, dan pengurus serikat perempuan seringkali kesulitan mendapatkan dispensasi untuk menghadiri kegiatan serikat. Ini semua menunjukkan adanya pola pelanggaran hak-hak dasar pekerja perempuan yang perlu segera ditangani.

Isu kesetaraan gender telah menjadi perhatian penting di Indonesia sejak kemerdekaannya. Pada pasal 27 paragraf 1 dalam Konstitusi tahun 1945, warga negara Indonesia tanpa pengecualian gender dianggap setara dihadapan hukum dan pemerintahan (Auli, 2024). Selaras dengan komitmen Indonesia ini, United Nations Development Program (UNDP) meyakini bahwa pemberdayaan laki-laki dan perempuan dengan setara merupakan aspek utama dalam pembangunan nasional (Dwiastuti et al., 2022). Artinya, pembangunan nasional akan berjalan dengan maksimal jika poin kesetaraan gender dapat terpenuhi. Perlu digaris bawahi, kesetaraan gender bukan hanya persoalan hak asasi manusia, tetapi juga merupakan prasyarat untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Lukman, 2024). Oleh karena itu, UNDP memasukkan kesetaraan gender sebagai salah satu pilar utama pada berbagai program dan kebijakannya. UNDP menyadari bahwa implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 5 tentang kesetaraan gender perlu menjadi aspek penting pada upaya pembangunan sosial, politik, hingga ekonomi.

Indonesia menaruh perhatian atas isu gender dengan mengadopsi Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan inisiatif global yang mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang secara eksplisit tercantum dalam Tujuan ke-5 (Goal 5). Menurut Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), kedua hal tersebut merupakan faktor fundamental untuk menciptakan pembangunan dan lingkungan yang berkelanjutan (Dwiastuti et al., 2022). Hal tersebut karena perempuan memegang peran penting melalui kontribusinya pada ranah rumah tangga hingga pertumbuhan ekonomi. Peran yang krusial dibarengi persoalan gender yang masih sering ditemukan ini mendorong terciptanya tuntutan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Lebih jauh isu gender dan upaya maksimal menciptakan pembangunan yang inklusif mendorong setiap elemen terutama keterlibatan pegiat isu gender untuk ikut terlibat pada kampanye pembangunan yang adil. Organisasi non-pemerintah, salah satunya Women in Tourism Indonesia (WTID), memiliki fokus utama untuk menciptakan pembangunan pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi agar tercipta lingkungan yang berkeadilan gender.

Women in Tourism Indonesia (WTID) merupakan organisasi non-pemerintah yang memiliki komitmen pada pemberdayaan perempuan terutama di sektor pariwisata (Monica, 2023). WTID berupaya memberikan ruang bagi perempuan dan kelompok minoritas lain untuk berdaya, membagikan ide serta pengalaman mereka, dan membangun kolaborasi untuk menciptakan pariwisata yang inklusif. Organisasi ini memiliki visi dan misi untuk menjalankan program kerjanya. Misi WTID meliputi memperkuat kompetensi perempuan di sektor pariwisata, mendorong perempuan untuk berbagi, terhubung, dan berjejaring guna meningkatkan keterampilan di bidang pariwisata; advokasi perempuan di sektor pariwisata; mempromosikan perubahan inovatif untuk pembangunan dan mengedepankan kesetaraan gender. Sedangkan, visi WTID yaitu menciptakan pariwisata yang inklusif, partisipatif, dan berlandaskan Sustainable Development Goals (SDGs). WTID menawarkan langkah-langkah konkrit menuju pemberdayaan

perempuan di sektor pariwisata. Program-program yang terimplementasi antara lain riset, perencanaan pariwisata, pembangunan ekonomi mikro, dan pelatihan pariwisata berbasis gender. Secara khusus, riset yang dilakukan oleh WTID berupaya untuk mengadvokasikan kebutuhan pelaku pariwisata terutama perempuan. Advokasi berbasis riset ini digunakan sebagai investigasi untuk kemudian digunakan sebagai bahan advokasi kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan.

Tabel di bawah (Monica et al. 2023) menunjukkan enam kasus pelecehan seksual di industri pariwisata, khususnya pada bidang *Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions/Events* (MICE), perhotelan, dan dinas pariwisata. Data menunjukkan terjadinya kekerasan pada rentang tahun 2017 hingga 2020. Berdasarkan enam data yang ada, kasus kekerasan seksual didominasi oleh pelecehan verbal, yang dialami oleh tiga korban, dan satu korban lainnya menyaksikan pelecehan secara verbal, sementara dua kasus lainnya merupakan pelecehan fisik. Pelaku kekerasan berasal dari berbagai jabatan, termasuk asisten artis, pemilik *tour & travel*, hingga perwakilan dinas pariwisata. Pada data di atas, informasi mengenai identitas korban atau bidang industrinya tidak dicantumkan secara lengkap, namun pola kekerasan yang terjadi menunjukkan kekerasan dalam dunia kerja pariwisata bukanlah hal yang jarang terjadi, terutama terhadap pekerja muda berusia 20 hingga 23 tahun.

Tabel 1. Kekerasan Seksual di Industri Pariwisata

Nama/Inisial	Umur	Bidang Industri	Bentuk Kekerasan (Verbal/Fisik)	Jabatan Pelaku	Tahun Kejadian
ARM	21	MICE	Mengalami pelecehan verbal	Asisten Artis	2017
M	21	MICE	Mengalami pelecehan verbal	Pemilik <i>Tour & Travel</i>	2018
	20		Mengalami pelecehan fisik	Pemilik <i>Tour & Travel</i>	2017
PM	23	Perhotelan	Menyaksikan pelecehan verbal	<i>Sales Marketing & Manager</i>	2019
HB	21	Dinas Pariwisata	Mengalami pelecehan verbal	Perwakilan Dinas Pariwisata	2020
			Mengalami pelecehan fisik	<i>Sales Marketing & Manager</i>	2020

Melihat bahwa sektor pariwisata masih menyimpan permasalahan ketidaksetaraan gender, urgensi program advokasi pun semakin meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini membahas terkait aspek gender sebagai komponen pembangunan berkelanjutan terutama di sektor pariwisata. Isu-isu ketimpangan gender di sektor pariwisata mendorong Women in Tourism Indonesia (WTID) sebagai salah satu organisasi yang berfokus menciptakan pariwisata yang inklusif bagi perempuan memiliki program advokasi untuk mewujudkan visi dan misinya. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini untuk menganalisis implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) pada program advokasi oleh Women in Tourism Indonesia (WTID).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Moleong digunakan untuk memahami sebuah fenomena yang sedang diteliti secara holistik menggunakan cara deskripsi dengan bentuk kata-kata (Agustini et al., 2020). Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui proses wawancara mendalam dengan Annisa Risfiana, anggota tim advokasi WTID. Wawancara yang telah dilakukan menghasilkan data terkait bentuk

advokasi yang dilakukan oleh WTID, objek advokasi, proses advokasi, tujuan advokasi, capaian, dan tantangan untuk melakukan advokasi. Sedangkan, data sekunder didapat dari studi pustaka dengan mengakses berbagai sumber literatur dari internet, termasuk jurnal, berita yang berkaitan dengan topik advokasi oleh WTID dan Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 5.

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Sustainable Development Goals (SDGs)

Kehadiran Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan pembaharuan dari Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2000. Program ini merupakan hasil dari kesepakatan 198 negara. MDGs memiliki delapan poin yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. MDGs memiliki target terciptanya pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2015. Namun, capaian yang didapatkan oleh MDGs belum sepenuhnya memenuhi target sehingga diperbaharui kembali melalui SDGs. Melalui Sidang PBB di New York pada 2015, 193 negara anggota menyepakati Agenda 2030 yang berisi 17 tujuan dan 169 target SDGs (Sustainable Development Solutions Network, 2015).

Momentum konsensus SDGs tahun 2015 oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi langkah yang lebih maju untuk upaya pembangunan berkelanjutan (Medina-Hernández et al., 2023). SDGs dinilai lebih progresif daripada program sebelumnya yaitu MDGs. SDGs melibatkan partisipasi lebih luas, mencakup negara-negara maju dan berkembang, memperbesar cakupan sumber pembiayaan, serta menempatkan hak asasi manusia sebagai prinsip utama. Selain itu, SDGs bersifat inklusif dengan mengikutsertakan organisasi masyarakat sipil, media, filantropi, sektor swasta, akademisi, dan para ahli untuk pelaksanaannya (PPN/Bappenas, 2020).

Indonesia telah ikut berpartisipasi aktif pada pelaksanaan SDGs. Pelaksanaan SDGs berada di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dilansir dari laporan Kementerian PPN/Bappenas, untuk menjalankan SDGs, Kementerian PPN/Bappenas bersama kementerian/lembaga terkait, organisasi masyarakat, media, filantropi, akademisi, dan para ahli menyusun kembali Rencana Aksi (Renaksi) SDGs yang diselaraskan dengan RPJMN. Hal tersebut digunakan sebagai acuan pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Tulisan ini berfokus pada implementasi SDGs nomor 5 tentang kesetaraan gender. Menurut United Nations Development and Programs (UNDP), pelaksanaan pembangunan tidak dapat mengalkan prinsip kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan prinsip utama untuk mendorong tercapainya kesadaran baik dari perempuan maupun laki-laki untuk menyadari potensinya, mendapatkan hak untuk menentukan pilihannya, dan menjalani kehidupan dengan layak dan berharga (Cameron, 2023). Kesetaraan gender menjadi sangat penting pada pembangunan karena baik laki-laki atau perempuan merupakan substansi pokok untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat masalah yang perlu diselesaikan untuk pemenuhan hak secara proporsional antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian sebelumnya oleh Amirya & Irianto (2023) menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi tiga permasalahan yang terjadi meliputi penyelarasan SDGs dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, koordinasi vertikal dan horizontal, serta peningkatan partisipasi pemangku kepentingan. Pemerintah perlu menerjemahkan agenda SDGs global menjadi perencanaan program SDGs nasional dan daerah. Penerjemahan ini membutuhkan kerja sama *multi stakeholders* untuk mengurai skala prioritas guna menghasilkan pembangunan yang seimbang. Selain itu, poin SDGs yang bervariasi mendorong koordinasi secara vertikal dan horizontal oleh bidang-bidang pelaksana seperti antara berbagai tingkat pemerintahan atau antar pemangku kebijakan. Koordinasi yang lemah ini perlu diatasi dengan membentuk mekanisme koordinasi di

setiap tingkatan untuk menjamin terjadinya komunikasi secara vertikal dan horizontal. Terakhir, SDGs bersifat inklusif, artinya perlu terbentuk sinergi kerja sama antara pemerintah, LSM global, LSM nasional, akademisi, hingga masyarakat sipil. Sinergi yang terbentuk diharapkan dapat membangun investigasi, implementasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan SDGs di Indonesia.

Selain itu, penelitian sebelumnya oleh (Zen & Mageiasti, 2025) yang berjudul “Analisis Penerapan SDGs Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Tinjauan Literatur dan Tantangan Implementasi” menunjukkan penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia masih mengalami beberapa tantangan. Penerapan SDGs dilakukan dengan mengintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Indonesia memprioritaskan beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan pada implementasi SDGs. Selain menentukan skala prioritas, Indonesia juga melakukan kolaborasi dengan masyarakat sipil dan sektor swasta. Walaupun demikian, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan signifikan, salah satunya masih mendapati kendala pada mekanisme koordinasi antara lembaga yang terlibat. Selain itu, terdapat kendala pendanaan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya SDGs. Untuk memecahkan kendala ini, penting untuk melakukan penguatan sinergi secara vertikal dan horizontal, serta memperkuat keterlibatan setiap elemen baik swasta maupun masyarakat sipil. Selain itu, perlu dilakukan upaya konkrit seperti pencerdasan secara menyeluruh melalui transparansi dan kampanye program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, terdapat beberapa gap pada fokus penelitian ini ditinjau dari perbedaan fokus poin Sustainable Development Goals (SDGs) dan ruang penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu secara lugas telah menjelaskan tantangan dan kendala yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs. Penelitian-penelitian sebelumnya telah secara gamblang menguraikan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan keseluruhan SDGs. Namun, kedua penelitian tersebut belum secara spesifik menyoroti SDGs nomor 5, yaitu kesetaraan gender. Ini menjadi celah krusial karena kesetaraan gender adalah fondasi penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memiliki dampak lintas sektor. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan fokus mendalam pada implementasi SDGs nomor 5. Selain itu, penelitian terdahulu memiliki ruang penelitian yang lebih luas, yaitu mengevaluasi implementasi SDGs di Indonesia. Sedangkan, penelitian ini akan memiliki ruang lingkup yang lebih terfokus. Penelitian ini mengkaji implementasi SDGs nomor 5 secara spesifik, dengan poin fokus penelitian pada upaya advokasi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah, Women in Tourism Indonesia (WTID).

B. Advokasi oleh Non-Governmental Organization

Advokasi oleh Organisasi Non-Pemerintah (NGO) memiliki peran yang penting pada dinamika sosial saat ini. Eksistensi NGO membawa tujuan, visi, dan misi yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Advokasi sendiri didefinisikan oleh Cohen sebagai upaya transformatif yang memengaruhi kebijakan dan peraturan untuk alokasi sumber daya pada sistem politik, ekonomi, dan sosial demi hajat hidup orang banyak (Simamora, 2018). Sejalan dengan definisi advokasi bagi Cohen, dapat dilihat aspek krusial kehadiran NGO melalui fungsinya untuk mengakomodir suara masyarakat yang cenderung termarginalkan, rentan, dan kurang mendapatkan atensi. Selain peran NGO sebagai suara pihak yang terpinggirkan, NGO mengisi celah kekosongan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat. NGO seringkali menjadi mitra kritis pemerintah untuk mengawasi praktik kerja pemerintah untuk menjamin terjadinya akuntabilitas dan *check and balances* (van Oort et al., 2023). Melalui program seperti advokasi kebijakan dan kampanye, NGO berupaya membangun kesadaran publik atas pentingnya memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Dengan pengamalan kegiatan seperti pelatihan, konseling, riset, dan pencerdasan melalui kampanye, NGO hadir membantu masyarakat memahami hak-hak mereka untuk mendapatkan keadilan dan meningkatkan

partisipasi masyarakat pada pembangunan berkelanjutan. Perlu diakui bahwa dengan perannya yang lebih *luwes* dan responsif, NGO mampu menjangkau setiap lapisan masyarakat sehingga perannya untuk advokasi menjadi sangat krusial.

PEMBAHASAN

Advokasi Women in Tourism Indonesia

Women in Tourism Indonesia (WTID) sebagai salah satu organisasi non-pemerintah yang bergerak pada bidang pariwisata dan kesetaraan gender juga melakukan advokasi untuk program kerjanya. Advokasi yang dilakukan oleh WTID sejalan dengan salah satu misinya untuk mengadvokasikan pekerja perempuan di sektor pariwisata untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan gender. Proses advokasi yang dilakukan oleh WTID diawali dengan tahapan riset untuk melihat persoalan yang sedang dialami oleh subjek. Riset inilah yang menjadi investigasi awal kebutuhan subjek terutama pelaku pariwisata. Riset dijadikan bahan evaluasi program untuk menentukan langkah konkrit yang dapat diambil. Sebagai contoh riset yang telah dilakukan oleh WTID adalah melakukan *indepth interview* kepada mahasiswa-mahasiswa yang melakukan magang di sektor pariwisata dan terjun langsung di industri pariwisata. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana industri pariwisata dianggap aman dari kekerasan seksual bagi perempuan. Penelitian dilakukan sebelum Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan. Berdasarkan hasil riset WTID tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan seksual karena relasi kuasa masih kerap terjadi terutama yang dilakukan oleh pelanggan kepada pekerja. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran dari pelaku pariwisata untuk penanganan dan edukasi terkait kekerasan seksual.

Selain riset yang dilakukan sebagai bahan evaluasi WTID juga menyelenggarakan berbagai acara untuk menjadi wadah bagi pelaku pariwisata terutama perempuan untuk berbagi, terkoneksi antarindividu, dan mengembangkan kemampuannya. Beberapa model kegiatan yang dilaksanakan oleh WTID adalah pelatihan dan webinar. Salah satu webinar yang telah dilakukan oleh WTID berusaha menggali perspektif wisatawan terkait kualitas pariwisata sehingga dapat digunakan untuk melakukan pemantauan atas kebijakan atau sistem pariwisata yang kurang inklusif. Webinar bertajuk “Mengarusutamakan Pariwisata Indonesia yang Ramah Gender dan Disabilitas” ini menghadirkan perspektif wisatawan dari elemen *influencer* hingga kelompok disabilitas. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai media menggali informasi atau investigasi untuk kemudian dikumpulkan pada asesmen sebelum melakukan advokasi.

Women in Tourism Indonesia (WTID) untuk menjalankan advokasinya memiliki cakupan atau batasan. WTID sebagai organisasi non-pemerintah satu-satunya yang bergerak di bidang kesetaraan gender dan pariwisata mencoba untuk dapat menjangkau tingkat nasional. Artinya, WTID berusaha memengaruhi kebijakan dari level pemerintah daerah hingga level pemerintah pusat. Komitmen ini tercermin dari riset yang telah dilakukan oleh WTID untuk mengetahui perspektif masyarakat luas Indonesia terkait isu gender pada industri pariwisata. WTID hingga saat ini berusaha untuk melakukan riset dan kegiatan-kegiatan penunjang advokasi untuk memengaruhi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pariwisata dan gender. WTID meyakini bahwa perubahan perlu dilakukan secara struktural dan kultural. Sehingga, upaya audiensi menjadi jalan yang ditempuh oleh WTID untuk berdialog dengan pembuat kebijakan terkait isu gender dan pariwisata. Walaupun bagi WTID, pemerintah sebagai pembuat kebijakan belum menganggap isu

gender dan pariwisata ini sebagai persoalan yang penting. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya keterbukaan pemerintah untuk menerima permintaan dialog agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif.

Analisis Implementasi Sustainable Development Goals Nomor 5

Analisis pengimplementasian Sustainable Development Goals (SDGs) tidak terlepas dari indikator-indikator untuk menilai tingkat keberhasilannya. Setiap poin SDGs memiliki parameter masing-masing sebagai alat pengukur tingkat keberhasilan atau capaiannya. Secara spesifik, penelitian ini menganalisis implementasi SDGs nomor 5, yaitu kesetaraan gender. SDGs poin 5 memiliki empat indikator keberhasilan meliputi proporsi terjadinya kekerasan seksual, kerangka hukum yang memadai, tersedia lapangan kerja dan akses ekonomi, serta angka pernikahan dibawah umur (Pratiwi et al., 2022). Menyoroti data laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), kuantitas perempuan yang mengisi jabatan manajerial cenderung menurun dari tahun 2021 hingga 2022. Sedangkan, selama kurun waktu 5 tahun (2016-2021) persentase kekerasan seksual sedikit menurun, namun kekerasan fisik mengalami peningkatan jumlah dari 1,80 persen menjadi 1,96 persen. Jumlah perempuan yang mengisi kursi parlemen di tingkat nasional cenderung meningkat. Kendati demikian, kursi perempuan di parlemen tingkat daerah mengalami stagnasi. Tingkat keberhasilan setiap indikator SDGs inilah yang kemudian menjadi bukti pentingnya peran advokasi oleh organisasi non-pemerintah sebagai *think tank* pemerintah, pengawas kebijakan, hingga mengisi celah untuk menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat luas.

Women in Tourism Indonesia memiliki empat nilai yang dijunjung sebagai pedoman untuk mewujudkan kesetaraan gender di bidang pariwisata. Pertama, *engage*, WTID terbuka pada setiap peluang untuk terhubung dengan setiap elemen guna mewujudkan tujuannya. Kedua, *empower*, WTID percaya bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berdaya, berinovasi, dan mengembangkan kreativitasnya. Ketiga, *educate*, bahwa pengalaman setiap individu merupakan pembelajaran untuk dapat dijadikan evaluasi dan pembenahan. Terakhir, *equality*, setiap kelompok maupun individu perlu saling menghargai dan menjunjung tinggi kesetaraan. Melalui nilai-nilai tersebut, WTID sepakat bahwa peran perempuan khususnya tidak hanya terbatas pada ranah domestik. Peran tersebut juga diaplikasikan pada ranah pekerjaan, terutama di bidang pariwisata. Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses jabatan manajerial selayaknya laki-laki. Selain itu, WTID berjuang untuk menghilangkan stereotip patriarki pada industri pariwisata yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. WTID percaya penghapusan label terkait bahwa perempuan adalah objek semata dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual. Bagi WTID, masih banyak pelaku pariwisata khususnya perempuan yang belum teredukasi tentang kekerasan seksual. Oleh sebab itu, WTID melakukan upaya edukasi melalui tulisan-tulisan hasil riset yang telah terpublikasikan pada laman resminya. Sebagai contoh, tulisan berjudul “Potret Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Strategi Pariwisata Nasional” pada laman WTID mengangkat topik terkait pemberdayaan perempuan agar menumbuhkan kesadaran perempuan untuk berdaya dan berkarya di sektor pariwisata.

Advokasi yang dilakukan WTID sejalan dengan prinsip SDGs nomor 5 tentang kesetaraan gender. Hal ini tercermin dari komitmen WTID yang tertuang dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilainya yang mengedepankan kesetaraan gender. Bersama dengan itu, WTID juga melakukan langkah-langkah konkret guna mendukung terimplementasinya indikator SDGs nomor 5 melalui

riset, kegiatan-kegiatan seperti webinar dan pelatihan, publikasi, serta berupaya memengaruhi kebijakan dengan mendorong terlaksananya dialog bersama pemerintah. Namun demikian, advokasi ini masih menemui tantangan seperti belum dilibatkan pada proses pembuatan kebijakan terkait pariwisata yang inklusif gender. Menurut penuturan Annisa Risfiana, narasumber sekaligus anggota tim advokasi WTID, pembahasan pada Forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali 2022 lalu menunjukkan kecenderungan untuk menekankan peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, khususnya melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dimiliki oleh perempuan. Meskipun hal ini mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan gender dalam sektor ekonomi produktif, pembahasan dalam KTT G20 belum memberikan perhatian terhadap aspek perlindungan bagi perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Selain itu juga, WTID masih berupaya untuk melakukan audiensi agar pemerintah selaku pembuat kebijakan dapat melihat sudut pandang hasil riset terkait isu gender dan pariwisata.

SIMPULAN

Komitmen Women in Tourism Indonesia untuk mengimplementasikan SDGs nomor 5 dilakukan salah satunya dengan advokasi. Advokasi ini berbentuk riset, kegiatan seperti pelatihan dan webinar, dan publikasi. WTID percaya bahwa menciptakan pariwisata yang inklusif gender perlu dilakukan secara struktural dan kultural. Secara struktural, WTID selalu berupaya memengaruhi kebijakan dengan mengusahakan terjadinya dialog bersama pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Upaya ini dilakukan agar hasil temuan dan riset oleh WTID dapat membantu terciptanya kebijakan industri pariwisata yang inklusif gender. Di sisi lain, secara kultural, WTID telah mengadakan kegiatan konkret seperti pelatihan dan webinar. Selain itu, melalui publikasinya, WTID melakukan pencerdasan dan penyadaran terkait pemberdayaan perempuan dan topik lain terkait pariwisata yang inklusif gender. Namun kendati masih mengalami tantangan pada upaya memengaruhi kebijakan, WTID mampu menjadi promotor pembangunan pariwisata yang berkeadilan gender. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa WTID melalui advokasinya telah mengimplementasikan SDGs khususnya nomor 5 tentang kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Grashinta, A., Putra, S., & Sukarman. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)* (Issue August).
- Amirya, M., & Irianto, G. (2023). TANTANGAN IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SGDs) DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 187-198. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38916>
- Auli, R. (2024). *Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tentang Equality Before the Law*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/equality-before-the-law-lt66793bdc35f83/>
- Cameron, L. (2023). Gender Equality and Development: Indonesia in a Global Context. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 179-207. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2229476>
- Dwiastuti, I., Raharyo, A., Farid, M., & Baskoro, R. (2022). Komitmen Indonesia dalam Implementasi SDGs Nomor 5 untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015-2021). *International Relations Journal*, 14(27), 1-17. <https://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/view/5901>

- Gandhawangi, S. (2020). *Meski Mayoritas, Upah Pekerja Perempuan di Sektor Wisata Lebih Rendah dari Laki-laki*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/08/01/berdayakan-perempuan-di-sektor-pariwisata/>
- JDIH BPK. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. *Sekretariat Presiden Republik Indonesia*, 1-7.
- Komnas Perempuan. (2022). Komnas perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Lukman, J. P. (2024). Pemberdayaan Perempuan Sebagai Poros Utama Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Kesetaraan, Kesejahteraan, Dan Keseimbangan Lingkungan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(8), 88-97. <https://doi.org/10.62504/jimr822>
- Medina-Hernández, E. J., Guzmán-Aguilar, D. S., Muñoz-Ólite, J. L., & Siado-Castañeda, L. R. (2023). The current status of the sustainable development goals in the world. *Development Studies Research*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/21665095.2022.2163677>
- Monica, A. R. (2023). *The Impact Between Self-Efficacy and Community Engagement on Psychological Empowerment in a Gender-Focused Tourism Curriculum : Insights from the WTIDcamp 2023 Program*. 90-106.
- Monica, A. R., Risfiana, A., & Cloudia Rohman, H. M. (2023). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Pekerja Perempuan di Sektor Pariwisata. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 190-216. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p190-216>
- Oktaviani, A., Anandiesti, D., Primani, E., & Ummah, A. (2025). *Analisis Pengaruh Budaya Patriarki dan Hambatannya dalam Studi Kasus Perjuangan Hak Perempuan di Kursi DPRD Kabupaten Bener*. 5, 62-71.
- PPN/Bappenas, K. (2020). *SDGs*. 753-753. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95870-5_300217
- Pratiwi, A. I., Paramartha, D. Y., Yulianingsih, E., Arsyi, F. A., Khairunnisah, Larasaty, P., Meilaningsih, T., & Saputri, V. G. (2022). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022*. 7, 1-245. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/12/22/500ea80678477e5923291a8/indikator-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-indonesia-2022.html>
- Siaran Pers. (2025). *Menko Airlangga: Indonesia Dorong Pariwisata Jadi Penguat Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Tengah Ketidakpastian Global*. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6303/menko-airlangga-indonesia-dorong-pariwisata-jadi-penguat-ekonomi-sosial-dan-budaya-di-tengah-ketidakpastian-global>
- Simamora, R. (2018). Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.7454/jki.v6i1.8617>
- Sustainable Development Solutions Network. (2015). Getting started with the Sustainable Development Goals: A Guide for Stakeholders. *Sustainable Development Solutions Network: A Global Initiative for the United Nations*, December, 1-38. [https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2217Getting started.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2217Getting%20started.pdf)
- van Oort, B., van 't Riet, H., Parejo Pagador, A., Lescauwaet Noboa, R., & Aantjes, C. (2023).

Understanding the what, how, and why in advocacy: Assessing the applicability of participatory process evaluation methodology in an advocacy context. *Evaluation*, 29(4), 509-527. <https://doi.org/10.1177/13563890231200057>

Zen, N. H., & Mageiasti, L. (2025). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Analisis Penerapan Sdgs Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia : Tinjauan Literatur Dan Tantangan Implementasi*. 3, 775-785.